

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.Ridwan Halim. *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdurahman, M. *Masalah Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Adrian Sutedi. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Bandung: Bhineka, 2019.
- . *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Anita D.A Kolopaking. *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni, 2020.
- Amirin, T. M. *Menyusun Rencana Penelitian (Cet. 3)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Akbar Kurnia Wahyudi. *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*. Surabaya: Prisma Mediatama, 2020
- Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. “*Reformasi Agraria Di Indonesia*.” Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- Bakri, Muhammad. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Hukum Agraria)*. Yogyakarta: Citra Media, 2020
- Basuki Sunaryo. Dalam Sukanti Ari Hutagalung & Ari Gunawan. *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019
- Dian Aries Mujiburohman. *Penegakan Hukum Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Djoni Sumardi Ghozali. *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia: Pengaturan Dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.
- Effendi Parangin. *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2021
- Farida Patittingi. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang education, 2021.

- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Ida Nurlinda. *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020
- Iman Soetiknjo. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: GMUP, 2020
- John Rawls. *A Theory of Justice (Terj.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Maria S. W. Sumardjono. *Kewenangan Negara Untuk Mengatur*. Yogyakarta: FH UGM, 1998
- Muhammad Ilham Arisaputra. *Reformasi Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017
- M. Togatorop. *Perlindungan Hak Atas Tanah MHA dalam Pengadaan Tanah*. Yogyakarta: STPN Press, 2019
- Purnaweni, H. *Pengelolaan Dampak Abrasi*. Semarang: Fastindo, 2021
- Riyanto, Astim. *Kapita Selekta Hukum Konstitusi*. Bandung: YAPEMDO, 2009
- Soedjarwo Soeromihardjo. *Mengkritisi UUPA*. Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- _____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo, 2001
- Soimim Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah (Ed. 2)*. Jakarta: Grafika, 2020
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suyanto. *Hapusnya Hak Atas Tanah*. Surabaya: Jakad Publishing, 2019
- Suwoto. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2020
- Urip Santoso. *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*. Depok: Kencana, 2021

B. TESIS, DISERTASI, JURNAL, KARYA ILMIAH

Abidin, H. Z., Meilano, I., Heryani, E., Budiwibowo, A., Bachri, S., Rommel, E., & Yanto, B.A. "Rekonstruksi Batas Persil Tanah Di Aceh Pasca Tsunami : Beberapa Aspek Dan Permasalahannya." *Jurnal Infrastruktur dan Lingkungan Binaan I*, no. 2 (2018): 1–10.

Ali Maskur. Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai di Kota Semarang. Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008

Mungkasa, Oswar. "Bank Tanah Sebagai Alternatif Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Majalah Agraria Edisi 2*, 2020.

Pratami, Bunga Desyana, Minarsih Minarsih, and Sri Ratu Ratna Intan. "Protection of Constitutional Rights for Female Coastal Workers in Pekalongan Against Loss of Land Rights: An Agrarian Law and Islamic Law Approach." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12, no. 1 SE-Articles (September 17, 2024): 95–124. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i1.3662>.

Rahayu Subekti. "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Yustisia Jurnal Hukum* 95, no. 2 (2016): 376–394.

Ramadhan, Tri Cahya. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tanahnya Musnah Akibat Bencana Alam Abrasi." *Lex Privatum* 5, no. 2 (2018).

Aprilla, A. P., Permadi, I., & Effendi, L. "Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Warga Negara Asing Dengan Meminjam Nama Warga Negara Indonesia." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2020).

Budhayati, Christina Tri. "Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut Uupa." *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* (2018).

Cici Mindan Cahyani, dan Arief Rahman. "Kajian Yuridis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Private Law* 1, no. 2 (2021): 161.

Dimas Firmansyah. "Dampak Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan." *Sekolah Tinggi Pertanian Nasional*, 2022.

Dwaidin Jaelani, Nur Azizah, Fardhi Fadilah Ramadhan, and Cecilia Nonifili Yuanita. "Studi Pola Adaptasi Masyarakat Yang Berprofesi Sebagai Nelayan Terhadap Bencana Banjir Rob." *Edusaintek Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi* (2024).

Firmansyah, Romi, and Sri Rahayu. "Pemodelan Banjir Rob Di Kota

- Pekalongan.” *Ruang* 10, no. 1 (May 2024): 48–59.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/13361>.
- Grinlinton, David. “The Intersection of Property Rights and Environmental Law.” *Environmental Law Review* 25, no. 3 (2023): 202–218.
<https://doi.org/10.1177/14614529231193804>.
- Jayadi, Ahkam. “Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan Dan Penegakan Hukum Negara.” *Jurnal Jurisprudentie* 6, no. 1 (2019).
- Khalida Khadija Khairullah, Azis Rifai, Elis Indrayanti. “Studi Luasan Genangan Banjir Rob Akibat Kenaikan Muka Air Laut Dan Penurunan Muka Tanah Di Kecamatan Sayung, Demak.” *Jurnal Geografi* 6, no. 4 (2024): 316–334.
- Rejekiningsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia).” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2020).
- Silambi, Erni Dwita, Daud Rahim, and Fadel Muhammad Pakaya. “PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo).” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 2 (2023): 77–86.
- Sri Utomo, A. D. S., Subiyanto, S., & Amarrohman, F. J. “Analisis Perubahan Zona Nilai Tanah Tahun 2012–2017 Akibat Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.” *Geodesi Undip* 6, no. 453–461 (2017).
- Suherman, Suherman, and Muhammad Ali Imran. “Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa.” *Indonesian Journal of Society Engagement* (2020).
- Tiara Dwi Rahayu, Yani Pujiwati, Betty Rubiati. “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Setelah Mengalami Likuefaksi Tanah.” *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria* 2, no. 2 (2023).
- Ufran, Nova Apriyanto dan Ufran. “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 447–452.
- Winahyu Erwiningsih. “Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Menurut UUD 1945.” *Jurnal Hukum* 16, no. No. Edisi Khusus (2021).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar 1945

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 Peraturan ini mengatur tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Musnah;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang telah diubah menjadi PP No. 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

D. WEBSITE/ INTERNET

Penasihat Hukum. “Tertulis dalam UUPA: Simak Asas-Asas Hukum Agraria.”

Diakses 13 Juli 2025. <https://www.penasihathukum.com/tertulis-dalam-uupa-simak-asas-asas-hukum-agraria>

PasarTrainer. "Mengenal Reklamasi dan Efek yang Diberikan kepada Lingkungan." PasarTrainer, 15 Juli 2024. Diakses 18 September 2025.

<https://pasartrainer.com/blog/mengenal-reklamasi-dan-efek-yang-diberikan-kepada-lingkungan>

Pemerintah Kabupaten Demak. "Update Infografis Bencana Banjir di Demak." Demak, 20 Mei 2025. Diakses 18 September 2025.

<https://demakkab.go.id/news/update-infografis-bencana-banjir-di-demak>